

**PENGARUH PDRB, UMK, INFLASI, DAN INVESTASI TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI KAB/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2007 - 2011**

**Tengkoë Sarimuda RB**

**Soekarnoto**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya

**ABSTRAK**

*Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi terhadap Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Populasi penelitian terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota, menggunakan data sekunder selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, dan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Analisis data menggunakan regresi data panel dengan paket program Eviews 7.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi, berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sementara secara parsial, PDRB dan UMK berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sedangkan Inflasi dan Investasi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.*

**Kata Kunci:** *Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB, UMK, Inflasi, Investasi, Metode Panel*

**ABSTRACT**

*This study is aiming to test the influence of the Gross Regional Domestic Product, Regency/City Minimum Wage, Inflation and Investment towards the Opened Unemployment in regency/city of East Java Province. The population of the research is comprised of 29 Regencies, and 9 Cities, applying the secondary data for 2007 to 2011 period, originating from the Statistic Center Board (BPS) of East Java Province, and Regency/City, Employment Service of East Java Province, and Capital Investment Board of East Java Province. Data analysis applies panel data regression of Eviews 7 program package.*

*The result of this research presents that the Gross Regional Domestic Product, Regency/City Minimum Wage, Inflation and Investment simultaneously have significant influence to the Opened Unemployment Rate in regency/city of East Java Province in 2007-2011. While, the Gross Regional Domestic Product and Regency/City Minimum Wage partially have significant influence to the Opened Unemployment Rate in regency/city of East Java Province in 2007-2011. And no influence of Inflation and Investment to the Opened Unemployment Rate in regency/city of East Java Province in 2007-2011.*

**Keywords:** *Open Unemployment Rate, Gross Regional Domestic Product, Regency/City Minimum Wage, Inflation, Investment, Panel Methode.*



**PENDAHULUAN**

Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang yaitu pengangguran merupakan masalah yang rumit dan lebih serius dari pada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan. Kondisi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini tidak sanggup menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak dari pada penambahan penduduk, sehingga masalah pengangguran dari tahun ke tahun semakin serius. Apabila hal tersebut tidak segera diatasi dan dicari jalan keluarnya, maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi menambah tingkat kemiskinan. (Siswosoemarto, 2012:460-461).

Kompleksitas permasalahan pengangguran ini memang perlu untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator. Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan, tingkat inflasi, serta besaran upah yang berlaku. Apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran pula. Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran (Sukirno, 2008: 53).

Perkembangan jumlah angkatan kerja, penduduk bekerja dan pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2007- 2011 dapat dilihat pada Tabel 1 :

**Tabel 1. Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja dan Pengangguran di Indonesia Tahun 2007 – 2011**

TAHUN	ANGKATAN KERJA (JIWA)	BEKERJA (JIWA)	PENGGANGGURAN (JIWA)	TPT (%)
2007	108.130.000	97.580.000	10.550.000	9,75
2008	112.477.447	103.049.857	9.427.590	8,38
2009	113.744.410	104.485.440	9.258.970	8,14
2010	115.998.060	107.405.570	8.592.490	7,41
2011	119.399.375	111.281.740	8.117.635	6,80

Sumber : BPS (Diolah)

Masalah pengangguran juga menjadi salah satu permasalahan utama di dalam pembangunan ekonomi di provinsi Jawa Timur, di mana tingkat pengangguran terbukanya masih tinggi. Perkembangan jumlah angkatan kerja, penduduk bekerja dan pengangguran terbuka di provinsi Jawa Timur tahun 2007- 2011, dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

**Tabel 2. Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja dan Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 – 2011**

TAHUN	ANGKATAN KERJA (JIWA)	BEKERJA (JIWA)	PENGGANGGURAN (JIWA)	TPT (%)
2007	20.117.924	18.751.421	1.366.503	6,79
2008	20.178.590	18.882.277	1.296.313	6,42
2009	20.338.568	19.305.056	1.033.512	5,08
2010	19.527.051	18.698.108	828.943	4,25
2011	19.761.886	18.940.340	821.546	4,16

Sumber : BPS (Diolah)

Penurunan jumlah pengangguran tersebut terlihat masih belum signifikan, dan angka pengangguran yang masih tinggi ini tetap menjadi beban dan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan penanganan secara intensif dari pemerintah daerah melalui berbagai upaya sistematis yang dirumuskan dalam strategi pembangunan provinsi Jawa Timur ke depan.

Salah satu indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk termasuk pengangguran yaitu pertumbuhan ekonomi yang merupakan peningkatan GDP. GDP itu sendiri adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri (milik warga negara dan orang asing) dalam sesuatu negara (Sukirno, 1994). Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang meningkat, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di negara tersebut, karena dengan kenaikan pendapatan nasional melalui GDP kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan GDP suatu negara dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran di suatu negara (Mankiw, 2000: 67).

Sementara untuk suatu wilayah, GDP tersebut dicerminkan dalam tingkat PDRB yang merupakan nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Dalam realitanya, PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Peningkatan output tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. PDRB provinsi Jawa Timur memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun (BPS Jatim, 2012).

Disamping PDRB, tingkat upah merupakan hal yang mendasar dalam ketenagakerjaan dan mempengaruhi perekonomian provinsi Jawa Timur, dimana kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Demikian pula sebaliknya dengan turunnya tingkat upah maka akan diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada tingginya pengangguran. Menurut Mankiw (2000), upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya.

Peningkatan biaya kebutuhan hidup dari tahun ke tahun tidak terlepas dari perkembangan tingkat inflasi, yaitu dimana keadaan yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung secara terus menerus. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara sehingga pemerintah harus menjalankan kebijakan yang tepat guna menjaga dan mengawasi laju inflasi. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4 persen dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Selanjutnya tingkat inflasi yang berkisar antara 7 sampai 10 persen dikatakan inflasi yang tinggi. Namun demikian ada negara yang menghadapi tingkat inflasi yang lebih serius atau sangat tinggi, misalnya Indonesia pada tahun 1966 dengan tingkat inflasi 650 persen. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebut hiper inflasi (*hyper inflation*). (Amir, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian Dinarno, John and Mark. P. Moore (1999), menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat inflasi melalui GDP deflator dengan tingkat pengangguran yang terjadi di Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan, semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi di negara-negara tersebut, akan mengakibatkan pengangguran

yang tinggi pula. Sedangkan penelitian yang dilakukan Amir (2007) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang nyata antara inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia periode 1980-2005.

Selain inflasi, investasi juga mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai investasi meningkat, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Barang dan jasa akhir yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang diminta.

Berdasarkan data dari UNCTAD (2004) tiga besar daerah tujuan investasi dunia adalah negara Asia yaitu RRC, Thailand dan India. Hal ini dikarenakan negara-negara Asia (Tenggara) merupakan potensi pasar yang besar bagi produk-produk mereka. Greenaway, Morgan dan Wright (2002) menemukan adanya dampak positif investasi asing di negara berkembang, yaitu pertumbuhan ekonomi negara-negara tujuan investasi menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Selain itu, investasi asing (langsung) juga membuka lapangan kerja baru bagi para penganggur di negara-negara berkembang. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Baier dan Bergstrand (2001) bahwa liberalisasi perdagangan memberikan sumbangan besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia. Sementara dalam hasil penelitian Roy (2004) terkait pola pengangguran dan industri di India, menemukan adanya *lag* atau jarak waktu antara pembukaan pabrik baru dan tambahan jumlah orang yang bekerja. Hal ini berarti penggunaan angka realisasi investasi langsung lebih bisa memprediksi pembukaan lapangan pekerjaan baru.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan-permasalahan seperti pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja harus mendapat perhatian yang menyeluruh dan terpadu, sebab salah satu hal yang penting dalam pembangunan ekonomi adalah mampu memberikan kesempatan kepada penduduk untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian/pasar kerja. Untuk melihat fenomena itu, penelitian ini ditujukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi secara simultan dan parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka di kab/kota provinsi Jawa Timur.



**TINJAUAN PUSTAKA**

**Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang membahas mengenai masalah PDRB, UMK, Inflasi, Investasi, dan pengangguran dapat dilihat pada Tabel

**Tabel 3. Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu**

Referensi	Objek Penelitian/Metode	Hasil
Walterskirchen (1999)	"The Relationship Between Growth, Employment, and Unemployment in EU". Menggunakan data panel negara di Eropa ; Spanyol, Jerman, Inggris, Perancis, Belanda, dan Austria pada periode 1970-1998.	Adanya hubungan negatif antara PDB dengan tingkat pengangguran di setiap Negara.
DiNarno dan Moore (1999)	Pengaruh inflasi dan pengangguran di sembilan negara OECD, dengan Metode Data Panel.	Adanya hubungan positif tingkat inflasi melalui GDP Deflator dengan tingkat pengangguran yang terjadi.
Trendle (2002)	Pengaruh variabel ekonomi dan demografi terhadap pengangguran di Queensland.	Angkatan kerja berpengaruh positif terhadap pengangguran dengan nilai koefisien sebesar 0,0222, jumlah penduduk lulusan sarjana (S1) memiliki korelasi negatif sebesar -0,3642, penduduk asli Australia juga memiliki hubungan yang negatif terhadap pengangguran dengan nilai koefisien -0,0810.
Soebagiyo, Haswarini, dan Chuzaimah (2005)	Pengaruh Kesempatan Kerja, Tingkat BTP, dan Pendidikan terhadap Pengangguran di propinsi Dati I Jawa Tengah. Menggunakan analisis Partial Adjustment Model	Pendidikan memiliki signifikansi terhadap tingkat pengangguran dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kesempatan kerja dan BTP tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.
Alim (2007)	Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia. Menggunakan analisis kurva phillips dan regresi linear berganda.	Pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.
Amir (2007)	Analisis Faktor Penentu Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 1980-2007, menggunakan analisis Regresi Linier Berganda.	Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan tingkat inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.
Sucitrawati dan Arka (2012)	Pengaruh Inflasi, Investasi, dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran di Propinsi Bali Tahun 1998-2011, dengan menggunakan analisis data panel.	Inflasi, investasi, dan tingkat upah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Secara parsial, inflasi dan investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, dan tingkat upah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

**Landasan Teori**

a. Pengangguran

Model perekonomian dua sektor Lewis menitik-beratkan pada proses pengalihan tenaga kerja dari sektor pertanian subsistem tradisional (yang ditandai oleh kelebihan penduduk dan produktivitas marjinal tenaga kerja sama dengan nol atau kondisi surplus tenaga kerja) ke sektor industri perkotaan modern (dengan tingkat produktivitas yang tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja), pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan

tenaga kerja di sektor modern yang ditentukan oleh tingkat investasi. (Todaro, 2006:132-133).

Model Lewis belum menjelaskan tentang pertumbuhan sektor pertanian, sehingga disempurnakan oleh Fei-Ranis dalam "*A Theory of Economic Development*". Fei-Ranis menganalisis pembangunan ekonomi dalam tiga tahap, yakni : tahap pertama, penganggur tersamar yang tidak menambah output pertanian dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Tahap kedua, pekerja pertanian menambah output pertanian

tetapi memproduksi lebih kecil dari pada upah institusional yang diperoleh, dan pekerja seperti ini juga dialihkan ke sektor industri. Jika pengalihan pekerja berlangsung terus menerus, maka akan dicapai suatu titik di mana pekerja pertanian menghasilkan output yang sama dengan upah institusional. Tahap ketiga merupakan akhir tahap tinggal landas dan awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan lebih besar dari pada perolehan upah institusional. Pada tahap ini kelebihan buruh sudah terserap dan sektor pertanian menuju menjadi komersial (Jhingan, 2003: 217-218).

Sementara Keynes dalam menganalisis masalah-masalah negara terbelakang, mendasarkan teori pada adanya pengangguran siklis yang terjadi selama depresi. Pengangguran ini disebabkan oleh menurunnya permintaan efektif. Pengangguran dapat diatasi dengan menaikkan tingkat permintaan efektif. (Jhingan, 2003: 135). Sedangkan Jhingan (2003:135) menyatakan bahwa sifat pengangguran yang disebabkan oleh depresi ekonomi pada negara terbelakang dan negara maju adalah berbeda. Dalam perekonomian di negara terbelakang yang sedang depresi, pengangguran yang muncul disebut pengangguran kronis. Pengangguran ini bukan disebabkan oleh kurangnya permintaan efektif tetapi sebagai akibat kurangnya sumber modal. Selain itu, di negara terbelakang juga dapat muncul pengangguran tersembunyi. Masalah pengangguran kronis dan tersembunyi ini dapat diatasi dengan pembangunan ekonomi.

b. Hubungan Pertumbuhan Output dan Pengangguran  
Arthur Okun (1929-1979) membuat konsep output potensial dan menunjukkan hubungan antara output dan pengangguran. Pengangguran biasanya bergerak bersamaan dengan output pada siklus bisnis. Pergerakan bersama dari output dan pengangguran dikenal dengan nama Hukum Okun yang menjelaskan bahwa setiap penurunan 2 persen GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen. Hukum Okun menjelaskan hubungan yang sangat penting antara pasar output dan pasar tenaga kerja, yang menggambarkan pergerakan jangka pendek pada GDP riil dan perubahan angka pengangguran. (Samuelson and Nordhaus, 2004: 365-366). Blanchard (2006:186-187) menjelaskan bahwa jika diasumsikan output dan tingkat pengangguran berubah secara bersama-sama, serta perubahan jumlah pekerja merefleksikan perubahan pada tingkat pengangguran.

### c. Hubungan Upah dan Pengangguran

Hubungan besaran upah yang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran dijelaskan oleh Kaufman dan Hotckiss (1999). Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran.

Menurut Samuelson (1997), peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek substitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, efek pendapatan yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya komoditi yang dibeli. Pada suatu tingkat upah tertentu, kurva penawaran tenaga kerja akan berlekuk kebelakang (*backward bending curve*).

Salvatore (2007) mengatakan teori yang signifikan untuk menjelaskan keadaan perekonomian di suatu daerah khususnya di Indonesia adalah teori kekakuan upah (*Wage rigidity*), yaitu gagalnya upah melakukan penyesuaian agar penawaran dan permintaan tenaga kerja sama. Jika kebijakan upah minimum diterapkan di atas tingkat keseimbangannya maka terjadi kekakuan upah, dimana upah tidak akan bergerak menuju ke titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja karena adanya batas oleh upah minimum. Sektor usaha akan mengurangi jumlah pekerja sehingga timbul pengangguran.

### d. Hubungan Inflasi dan Pengangguran

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi

akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi (Sukirno, 2008).

Salvatore (2007) dalam penjelasannya tentang inflasi melalui Kurva Philips, menjelaskan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat dengan gambaran bahwa jika dalam suatu perekonomian awalnya tingkat inflasi sebesar 4 persen dengan tingkat pengangguran sebesar 7 persen. Dengan naiknya permintaan agregat, maka harga akan naik pula. Dengan tingginya harga, maka inflasi meningkat sebesar 6 persen, sehingga untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan *output*). Akibat dari peningkatan penyerapan tenaga kerja maka pengangguran menjadi berkurang menjadi sebesar 2 persen. Hubungan ini juga bisa dilihat dari tingkat

inflasi yang stabil akan menurunkan tingkat suku bunga secara langsung, kemudian akan memicu banyaknya permintaan atas kredit usaha dan akan banyak industri atau sektor usaha yang bermunculan, sehingga jumlah penyerapan tenaga kerja meningkat seiring kesempatan kerja yang tinggi.

e. Hubungan Investasi dan Pengangguran

Besarnya investasi yang terjadi di masyarakat akan sangat mempengaruhi besarnya kesempatan kerja yang tercipta dalam masyarakat tersebut. Investasi akan meningkatkan kegiatan produksi sehingga akan membuka kesempatan kerja baru. Adanya kesempatan kerja baru akan menyebabkan berkurangnya jumlah pengangguran, sehingga antara investasi dan pengangguran memiliki korelasi negatif. Hal ini berarti jika tingkat investasi naik maka tingkat pengangguran akan turun, dan begitu sebaliknya apabila investasi turun, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Namun apabila investasi yang ditanamkan bersifat padat modal, maka kenaikan investasi tidak berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja.



**METODE PENELITIAN**

**Model Analisis**

Model analisis yang digunakan adalah model regresi data panel, menggunakan bentuk persamaan sebagai berikut :

$$PT_{it} = \alpha + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 UMK_{it} + \beta_3 INF_{it} + \beta_4 INV_{it-1} + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Di mana ;  $PT_{it}$  adalah tingkat pengangguran terbuka per kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur pada tahun  $t$ ,  $PDRB_{it}$  adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur pada tahun  $t$ ,  $UMK_{it}$  adalah Upah Minimum per kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur pada tahun  $t$ ,  $INF_{it}$  adalah tingkat Inflasi per kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur pada tahun  $t$ ,  $INV_{it-1}$  adalah realisasi nilai investasi per kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur pada tahun  $t$ . Sedangkan tanda  $\alpha$  adalah Konstanta,  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  adalah Koefisien regresi variabel bebas, dan tanda  $e_{it}$  adalah *error term*/koefisien pengganggu.

**Lokasi dan Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder selama periode tahun 2007-2011 di 29 kabupaten dan 9 kota Provinsi Jawa Timur dan menggunakan populasi yang merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisis

yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah 38 kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa instansi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, antara lain ; Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Badan Penanaman Modal (BPM) Jawa Timur, dan instansi terkait di kabupaten/kota.

**Pengolahan dan Analisis Data**

Ada tiga metode estimasi yang umum digunakan dalam analisis data panel yaitu :

- a. *Ordinary Least Square (OLS)* :  

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + u_{it} \dots \dots \dots (2)$$
- b. *Fixed Effects Model (FEM)* :  

$$Y_{it} = \alpha_i + \alpha_2 D_2 + \dots + \alpha_n D_n + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + u_{it} \dots \dots \dots (3)$$
- c. *Random Effects Model (REM)* :  

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it} + u_{it} \dots \dots \dots (4)$$

Pendekatan yang paling sesuai akan ditentukan melalui serangkaian uji statistik. Untuk menentukan pendekatan yang lebih sesuai antara OLS dengan FE maka dapat dilakukan *restricted F test*. Dalam hal ini

model OLS dapat dianggap sebagai versi restriksi dari model FEM. Jika restriksi ini diterima secara statistik maka koefisien *dummy* perbedaan konstanta tidak signifikan. Dengan demikian pendekatan OLS akan lebih tepat. Namun jika justru penambahan *dummy* signifikan secara statistik maka model FE memberikan estimator yang lebih sesuai. Pendekatan REM bisa dipilih jika asumsi non-korelasi antara *error* dengan salah satu variabel independen bisa dipenuhi. Jika tidak, maka pendekatan REM akan menghasilkan estimator yang tidak konsisten sehingga pendekatan FE akan memberikan hasil yang lebih sesuai. Uji antara FEM dengan REM dapat dilakukan melalui *Hausman test*.

**Pengujian Statistik**

a. Uji  $R^2$

Uji  $R^2$  ini adalah untuk menunjukkan seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dengan baik. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0-1. Suatu model *time series* apabila  $R^2$  mencapai angka 1 maka variabel independennya dapat menerangkan variabel dependen dengan sempurna. Sebaliknya apabila  $R^2$  mencapai angka 0 berarti variabel bebas tidak dapat atau lemah dalam menjelaskan variabel terikat.

b. Uji F (secara bersama-sama)

Kegunaan uji *F* untuk menentukan signifikan atau tidaknya variabel bebas secara bersama-sama dalam

mempengaruhi variabel terikat. Jika hasil estimasi diperoleh  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) ditolak. Hal ini berarti variasi model regresi tidak berhasil menjelaskan variabel bebas. Sebaliknya, jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima. Artinya variasi dari model regresi dapat menjelaskan variasi variabel bebas.

**c. Uji t (parsial)**

Fungsi uji *t* adalah untuk menentukan signifikansi suatu variabel bebas secara individual dalam mempengaruhi variabel terikat. Dalam hal ini diterapkan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_1 : \beta_i \neq 0$$

Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) ditolak artinya model yang digunakan kurang baik, dengan kata lain variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau berpengaruh tidak signifikan. Sebaliknya jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka artinya variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat atau berpengaruh signifikan.



**HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Metode FEM**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	12.85711	1.039884	12.36399	0.0000
PDRB	-1.53E-07	06.82E-08	-2.241348	0.0265
INF	0.103149	0.068586	1.503942	0.1347
UMK	-9.10E-06	1.11E-06	-8.218668	0.0000
INV	-4.19E-14	3.14E-14	-1.331904	0.1849
Effects Specification				
Cross-Section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-Squared	0.863638			
Adjusted R-Squared	0.825862			
S.E. of regression	1.152512			
F-Statistic	22.86217			
Prob (F-statistic)	0.000000			
Durbin-Watson Stat	1.418452			

Sumber: hasil pengolahan Eviews

Berdasarkan Tabel 4. dapat dibuat hasil estimasi persamaan regresi data panel dari penelitian ini,

yaitu :

$$TPT = 12,85711 - 1,53E-07PDRB + 0,103149INF - 9,10E-06UMK - 4,19E-14INV..... (5)$$

**Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Hasil analisis regresi data panel dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang menunjukkan kemampuan semua variabel bebas secara bersama-sama mampu untuk menjelaskan lebih lanjut variasi dari perubahan variabel terikat. Hasil dari pengolahan data diperoleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.8636. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel terikat dalam model penelitian ini dapat dijelaskan sebesar 86,36 % oleh variabel bebas dalam model penelitian yaitu PDRB, UMK, inflasi, dan investasi sedangkan sisanya sebesar 13,64 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model pada penelitian.

**Uji F (secara bersama-sama)**

Pembuktian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat dilakukan

dengan menggunakan uji F. Berdasarkan hasil perhitungan uji F diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 21,3976 dengan nilai probabilitas 0,0000 dan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 1,46 dengan numerator = 37 dan denominator = 185 dengan tingkat derajat keyakinan ( $\alpha=5\%$ ). Angka dari hasil perhitungan menunjukkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , dimana nilai probabilitas lebih kecil dari derajat signifikansi 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti secara bersama-sama variabel bebas yaitu PDRB, UMK, inflasi, dan investasi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.

**Uji t (parsial)**

Pembuktian hasil analisis regresi data panel secara parsial pada variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tingkat derajat keyakinan ( $\alpha=5\%$ ) dalam penelitian ini melalui koefisien parsial uji t dapat dilihat pada Tabel 5 berikut :

**Tabel 5. Hasil Regresi Data Panel Uji t**

Variabel Bebas	Prob t-statistik	Signifikansi ( $\alpha=5\%$ )
PDRB	0.0265	Signifikan ( $\alpha=5\%$ )
INFLASI	0.1347	Tidak Signifikan ( $\alpha=5\%$ )
UMK	0.0000	Signifikan ( $\alpha=5\%$ )
INV	0.1849	Tidak Signifikan ( $\alpha=5\%$ )

Sumber: Hasil Perhitungan Eviews

**Pembahasan**

Berdasarkan pada uraian perhitungan hasil estimasi persamaan model regresi data panel dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0.8636 yang memiliki arti bahwa variabel bebas yang terdiri dari PDRB, UMK, inflasi, dan investasi dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikat yaitu tingkat pengangguran terbuka sebesar 86,36 %, sedangkan sisanya sebesar 13,64 % dijelaskan oleh variabel-variabel diluar variabel pada model dalam penelitian ini.

Variabel bebas yang terdiri dari PDRB, UMK, inflasi, dan investasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sementara secara parsial, variabel PDRB dan UMK mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat dalam penelitian ini, sedangkan variabel inflasi dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.

- a. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan hasil estimasi variabel PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka dalam penelitian ini, PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini terlihat dari koefisien variabel PDRB yang bertanda negatif sebesar -1,53E-07 dengan nilai t-stat sebesar -2,2413 dan diperoleh probabilitas signifikansi sebesar 0,0265 yang lebih kecil dari derajat signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan sebesar 0,05. Hasil ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1 milyar rupiah pada PDRB maka akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 15,3 %.

Signifikansi pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011 disebabkan oleh peningkatan PDRB pada masing-masing kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang berorientasi pada sektor riil sehingga berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan jumlah pengangguran, mulai dari sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, hingga sektor jasa-jasa. Diantara sektor tersebut, terdapat tiga sektor unggulan yang berkontribusi paling dominan dalam pembentukan PDRB dan menyerap tenaga kerja, yaitu ; sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian.

Pada tahun 2007, peran sektor industri pengolahan di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur dalam pembentukan masing-masing PDRB, paling rendah berada di daerah agraris yang struktur ekonomi didominasi oleh sektor pertanian, yaitu ; kabupaten Bangkalan, kabupaten Sampang, kabupaten Pamekasan, kabupaten Sumenep, kabupaten Blitar, kabupaten Pacitan, kabupaten Madiun, kabupaten Ponorogo, kabupaten Lamongan, kabupaten Trenggalek, kabupaten Banyuwangi, kabupaten Ngawi, kota Batu, kabupaten Bojonegoro, kabupaten Nganjuk, dan kabupaten Magetan. Sedangkan peran paling tinggi berada di wilayah yang didominasi oleh



sektor industri pengolahan, yaitu kabupaten Gresik, kabupaten Sidoarjo, kabupaten Mojokerto, dan kota Kediri. Kabupaten Gresik sangat didukung oleh industri pupuk dan bahan kimia, industri barang dari kayu, industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki. Kabupaten Sidoarjo didukung oleh industri kertas dan barang cetakan serta industri makanan, dan minuman. Kabupaten Mojokerto didukung oleh industri kertas dan barang setakan serta industri makanan, minuman, dan tembakau. Sementara untuk kota Kediri sangat didukung oleh industri rokok.

Dibandingkan tahun 2007, peran sektor industri pengolahan di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur dalam pembentukan masing-masing PDRB mengalami peningkatan pada tahun 2011, dimana kabupaten Kediri meningkat dari 22,47% menjadi 23,41%, kabupaten Malang meningkat dari 21,39% menjadi 22,38%, kabupaten Tulungagung meningkat dari 19,85% menjadi 20,01%, kabupaten Bondowoso dari 18,65% meningkat menjadi 18,78%, dan kabupaten Lamongan meningkat dari 5,28% menjadi 5,37%.

Pada tahun 2007, peran sektor perdagangan, hotel, dan restoran di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur dalam pembentukan masing-masing PDRB, paling rendah berada di kabupaten Pacitan, kabupaten Pamekasan, kabupaten Sumenep, kota Kediri, kabupaten Pasuruan, dan kabupaten Gresik. Sedangkan peran yang paling tinggi berada di kota Surabaya, kota Probolinggo, kota Batu, dan kota Madiun. Pada tahun 2011, peran sektor perdagangan, hotel, dan restoran di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur paling tinggi tetap berada di kota Surabaya sebesar 41,54%, kota Probolinggo sebesar 41,65%, kota Batu 42,93%, dan kota Madiun mencapai 46,49%. Untuk kota Surabaya, kota Probolinggo dan kota Madiun sub sektor perdagangan sangat berperan. Sedangkan di kota Batu sub sektor hotel memberikan peran yang cukup signifikan karena merupakan salah satu daerah tujuan wisata di provinsi Jawa Timur.

Peran sektor pertanian pada tahun 2007 di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur dalam pembentukan masing-masing PDRB, paling rendah berada di kota Surabaya, kota Kediri, kota Malang, kota Madiun, kabupaten Sidoarjo, kota Mojokerto, kota Pasuruan, dan kota Blitar. Sedangkan yang paling tinggi berada di daerah agraris yang struktur ekonomi didominasi oleh

sektor pertanian, yaitu ; kabupaten Pacitan, kabupaten Jember, kabupaten Trenggalek, kabupaten Sampang, kabupaten Bondowoso, kabupaten Banyuwangi, kabupaten Lamongan, kabupaten Blitar, kabupaten Pamekasan, dan kabupaten Sumenep. Pada tahun 2011 komposisi peran sektor pertanian mengalami beberapa perubahan, dimana paling tinggi dihasilkan oleh kabupaten Sampang, kabupaten Bondowoso, kabupaten Banyuwangi, kabupaten Lamongan, kabupaten Blitar, kabupaten Pamekasan, dan kabupaten Sumenep.

b. Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil estimasi antara inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka dalam penelitian ini, secara parsial inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini terlihat dari koefisien variabel inflasi yang bertanda positif sebesar 0,103149 dengan nilai t-stat sebesar 1,503942 dan diperoleh probabilitas signifikansi sebesar 0,1347 yang lebih besar dari taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan sebesar 0,05. Hasil estimasi ini berarti tidak ada pengaruh yang nyata antara inflasi dengan tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur selama tahun 2007 – 2011. Hal ini disebabkan tingkat inflasi yang terjadi di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tidak disebabkan oleh terjadinya peningkatan permintaan agregat (*Demand Pull Inflation*) yang bermutiflier efek terhadap peningkatan kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja sehingga akhirnya mengurangi jumlah pengangguran. Namun tingkat inflasi yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak berefek kepada penyerapan tenaga kerja, yaitu ; adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak kepada kenaikan harga-harga barang dan jasa, krisis ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian secara negatif sehingga menaikkan tingkat inflasi, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berefek kepada meningkatnya biaya produksi sehingga disikapi oleh produsen dengan menaikkan harga-harga barang, perubahan nilai kurs asing, kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disikapi oleh para produsen dengan menaikkan harga barang dan jasa, dan anomali iklim serta bencana alam yang berdampak kepada gagal panen dan berkurangnya pasokan bahan kebutuhan pokok.

c. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan variabel UMK yang digunakan diketahui bahwa UMK berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur selama tahun 2007–2011. Hal ini terlihat dari koefisien variabel UMK yang bertanda negatif sebesar  $-9,10E-06$  dengan nilai t-stat sebesar  $-8,218668$  dan diperoleh nilai probabilitas sebesar  $0,0000$  yang lebih kecil dari derajat signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan sebesar  $0,05$ . Hasil estimasi ini berarti setiap kenaikan 1 ratus ribu rupiah pada UMK maka akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar  $0,91\%$ .

Signifikansi tersebut disebabkan kenaikan UMK yang terjadi di masing-masing kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011 masih berada dibawah titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja, sehingga tidak terjadi kekakuan upah. Kenaikan UMK tersebut lebih mendorong tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan begitu juga bagi sektor usaha, kenaikan UMK tidak disikapi oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerja tetapi dijadikan sebagai strategi penting dalam meningkatkan kinerja pekerja secara nyata, mendorong terpeliharanya kelangsungan hidup satuan kerja, terwujudnya visi dan misi dan untuk pencapaian sasaran kerja melalui produktivitas yang tinggi yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada.

Jika suatu perusahaan sangat dibebani oleh besaran UMK yang telah ditetapkan dan belum dapat menyesuaikan kenaikan UMK karena meningkatnya biaya produksi, maka perusahaan tersebut dapat mengajukan permohonan penangguhan pembayaran kenaikan UMK yang telah ditetapkan dengan menunjukkan bukti kesulitan dalam keuangan. Demikian juga dengan kenaikan UMK yang berdampak kepada meningkatnya biaya produksi, tidak dapat disikapi oleh perusahaan dengan melakukan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena terikat dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

d. Pengaruh Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam hasil estimasi penelitian ini, secara parsial variabel investasi mempunyai hubungan yang negatif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota

provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Tidak adanya pengaruh signifikan tersebut disebabkan kesenjangan yang relatif besar realisasi investasi di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur sehingga peningkatan penyerapan tenaga kerja yang tinggi hanya terjadi pada beberapa kabupaten/kota, sedangkan kabupaten/kota lainnya realisasi investasi relatif masih kecil sehingga penyerapan tenaga kerja juga rendah.

Berdasarkan data Badan Penanaman Modal (BPM) provinsi Jawa Timur, realisasi PMDN di kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 hanya terdapat pada beberapa kabupaten/kota, antara lain ; kabupaten Pasuruan nilai investasi sebesar Rp.  $0,59$  trilyun dengan 9 proyek dan menyerap tenaga kerja sebesar  $2.696$  orang, kabupaten Gresik sebesar Rp.  $0,64$  trilyun dengan 6 proyek dan menyerap tenaga kerja sebesar  $2.436$  orang, kota Surabaya sebesar Rp.  $0,22$  trilyun dengan 10 proyek dan menyerap tenaga kerja  $3.031$  orang, kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.  $0,99$  trilyun dengan 13 proyek dan tenaga kerja yang diserap  $6.755$  orang, kabupaten Mojokerto sebesar Rp.  $0,15$  trilyun dengan 3 proyek dan menyerap  $290$  orang tenaga kerja, kabupaten Malang sebesar Rp.  $1,63$  trilyun dengan 3 proyek dan menyerap tenaga kerja  $2.591$  orang, dan kota Kediri sebesar  $0,09$  trilyun dengan 1 proyek dan tenaga kerja yang terserap sebesar  $120$  orang.

Begitu juga pada tahun 2010, di kabupaten Pasuruan sebesar Rp.  $2,66$  trilyun dengan 20 proyek dan menyerap tenaga kerja sebesar  $4.483$  orang, kabupaten Tuban sebesar Rp.  $1,39$  trilyun dengan 8 proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak  $2.747$  orang, kabupaten Gresik sebesar Rp.  $0,68$  trilyun dengan 15 proyek dan tenaga kerja yang terserap  $1.910$  orang, kota Surabaya sebesar Rp.  $0,79$  trilyun dengan 23 proyek dan menyerap  $3.150$  orang tenaga kerja, kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.  $0,74$  trilyun dengan 38 proyek dan menyerap tenaga kerja  $7.810$  orang, kabupaten Mojokerto sebesar Rp.  $0,84$  trilyun dengan 7 proyek dan menyerap tenaga kerja  $990$  orang, kabupaten Malang sebesar Rp.  $2$  trilyun dengan 8 proyek dan menyerap tenaga kerja sebesar  $595$  orang, kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.  $0,47$  trilyun dengan 2 proyek dan menyerap tenaga kerja  $117$  orang, kabupaten Jember sebesar Rp.  $0,01$  trilyun dengan 2 proyek dan menyerap tenaga kerja hanya sebesar  $12$  orang.

Sementara pada tahun 2011, realisasi PMDN terdapat di kabupaten Pasuruan sebesar Rp.  $1,34$

trilyun dengan 26 proyek dan menyerap tenaga kerja sebesar 4.990 orang, kabupaten Kediri sebesar Rp. 0,25 trilyun dengan 5 proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.095 orang, kabupaten Tuban sebesar Rp. 3,60 trilyun dengan 11 proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 10.325 orang, kabupaten Gresik sebesar Rp. 3,07 trilyun dengan 31 proyek dan tenaga kerja yang terserap 6.910 orang, kota Surabaya sebesar Rp. 2,14 trilyun dengan 42 proyek dan menyerap 8.671 orang tenaga kerja, kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 7,16 trilyun dengan 43 proyek dan menyerap tenaga kerja 10.827 orang, kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 0,26 trilyun dengan 10 proyek dan menyerap tenaga kerja 1.269 orang, kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 0,06 trilyun dengan 2 proyek dan menyerap tenaga kerja sebesar 400 orang, kabupaten Malang sebesar Rp. 1,73 trilyun dengan 8 proyek dan menyerap tenaga kerja 4.988 orang, kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 0,67 trilyun dengan 1 proyek dan menyerap tenaga kerja 142 orang, dan kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 0,03 trilyun dengan 2 proyek dan menyerap tenaga kerja hanya 150 orang.

Ketidakmerataan investasi dan penyerapan tenaga kerja juga terlihat pada realisasi PMA di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2009 di kabupaten Gresik sebesar Rp. 0,23 trilyun dengan 11 proyek dan menyerap tenaga kerja sebesar 829 orang, kota Surabaya sebesar Rp. 0,38 trilyun dengan 15 proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.684 orang, kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 1,69 trilyun dengan 17 proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.969 orang, kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 0,64 trilyun dengan 12 proyek dan tenaga kerja yang terserap 2.115 orang, kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 0,38 trilyun dengan 4 proyek dan menyerap 1.355 orang tenaga kerja, kabupaten Jombang sebesar Rp. 0,08 trilyun dengan 2 proyek dan menyerap tenaga kerja 3.322 orang, kabupaten Malang sebesar Rp. 0,10 trilyun dengan 2 proyek dan menyerap tenaga kerja 132 orang, kabupaten Lamongan sebesar Rp. 0,22 trilyun dengan 1 proyek dan menyerap tenaga kerja sebesar 90 orang, kabupaten Kediri sebesar Rp. 0,01 trilyun dengan 1 proyek dan menyerap tenaga kerja 146 orang, kabupaten Madiun sebesar Rp. 0,10 trilyun dengan 4 proyek dan hanya dapat menyerap tenaga kerja 614 orang.

Sementara pada tahun 2010 realisasi PMA hanya terdapat di kabupaten Gresik sebesar Rp. 4,16

trilyun dengan 16 proyek dan menyerap tenaga kerja sebesar 1.650 orang, kabupaten Tuban sebesar Rp. 0,48 trilyun dengan 3 proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 64 orang, kota Surabaya sebesar Rp. 0,37 trilyun dengan 31 proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.747 orang, kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 5,63 trilyun dengan 2 proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 88 orang, kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 2,03 trilyun dengan 15 proyek dan tenaga kerja yang terserap 2.052 orang, kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 0,41 trilyun dengan 11 proyek dan menyerap 891 orang tenaga kerja, kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 0,11 trilyun dengan 12 proyek dan menyerap tenaga kerja 1.555 orang, kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 0,02 trilyun dengan 1 proyek dan menyerap tenaga kerja 60 orang, kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 0,01 trilyun dengan 1 proyek dan menyerap tenaga kerja sebesar 25 orang, kabupaten Pamekasan sebesar Rp. 0,04 trilyun dengan 1 proyek dan hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 12 orang.

Sedangkan pada tahun 2011, realisasi PMA hanya terdapat di kabupaten Gresik sebesar Rp. 0,55 trilyun dengan 20 proyek dan menyerap tenaga kerja sebesar 1.866 orang, kabupaten Tuban sebesar Rp. 0,07 trilyun dengan 2 proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 195 orang, kota Surabaya sebesar Rp. 1,90 trilyun dengan 48 proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 5.908 orang, kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 7,60 trilyun dengan 3 proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 96 orang, kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 2,32 trilyun dengan 26 proyek dan tenaga kerja yang terserap 6.747 orang, kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 0,65 trilyun dengan 20 proyek dan menyerap 1.566 orang tenaga kerja, kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 0,84 trilyun dengan 28 proyek dan menyerap tenaga kerja 8.035 orang, kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 0,03 trilyun dengan 1 proyek dan menyerap tenaga kerja 25 orang, kabupaten Jombang sebesar Rp. 0,02 trilyun dengan 6 proyek dan menyerap tenaga kerja sebesar 2.429 orang, kabupaten Malang sebesar Rp. 0,20 trilyun dengan 6 proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 279 orang, kabupaten Lamongan sebesar Rp. 0,19 trilyun dengan 1 proyek dan tenaga kerja yang terserap 522 orang, kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 0,09 trilyun dengan 1 proyek dan menyerap 150 orang tenaga kerja, kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 0,01 trilyun

dengan 2 proyek dan hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40 orang.

Meskipun penyerapan tenaga kerja tinggi terjadi pada beberapa kabupaten/kota sebagai daerah realisasi investasi, tetapi tingkat pengangguran di daerah tersebut juga relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya di provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan kerja lebih tinggi dibanding dengan penyerapan tenaga kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, tingginya urbanisasi pencari kerja, dan masih kurangnya investasi di sektor riil.

Disamping hal tersebut, masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi

Jawa Timur juga disebabkan oleh tidak adanya pemetaan potensi pekerja di masing-masing daerah. Untuk mempermudah pencari kerja, seluruh kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur harus memetakan potensi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, sehingga dengan adanya informasi pemetaan tersebut dapat membantu dalam upaya mendatangkan investor yang sesuai dengan potensi lapangan, dan ketidakcocokan perusahaan dengan tenaga kerja yang dicari yang selama ini banyak terjadi dapat diminimalisir



## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Variabel PDRB mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011, artinya setiap peningkatan PDRB akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Signifikansi ini disebabkan alokasi pembentukan nilai PDRB dari berbagai sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran.
2. Variabel UMK mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011, artinya setiap peningkatan UMK akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Signifikansi ini disebabkan selama tahun 2007-2011 tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur lebih disebabkan oleh banyaknya angkatan kerja yang tidak bekerja karena memilih pekerjaan dengan upah tinggi atau lebih menginginkan bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan upah yang relatif lebih besar.
3. Variabel Inflasi mempunyai hubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011, artinya tidak ada pengaruh yang nyata antara inflasi dengan tingkat pengangguran terbuka di

kabupaten/kota provinsi Jawa Timur selama tahun 2007 – 2011. Hal ini disebabkan inflasi yang terjadi di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur selama tahun 2007 – 2011 lebih disebabkan oleh faktor lain yang tidak berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran.

4. Variabel Investasi mempunyai hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011, artinya realisasi investasi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2007-2011 tidak berkontribusi dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini disebabkan karena realisasi investasi setiap tahunnya hanya pada beberapa kabupaten/kota, seperti ; kota Surabaya, kabupaten Sidoarjo, kabupaten Gresik, kabupaten Mojokerto, kabupaten Pasuruan, dan kabupaten Banyuwangi.

### Saran

1. Pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDRB memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Untuk itu, dalam strategi pembangunan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota provinsi Jawa Timur perlu ditekankan pendekatan ekonomi sektoral, khususnya sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, seperti ; peningkatan sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan, Hotel dan Restoran.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran

terbuka di kabupaten/kota propinsi Jawa Timur selama tahun 2007 – 2011. Untuk itu, pemerintah melalui Dewan Pengupahan kabupaten/kota, serikat pekerja, dan pengusaha perlu bersama-sama untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan besaran upah, sehingga keinginan angkatan kerja untuk bekerja semakin tinggi dan pengusaha masih memperoleh keuntungan yang layak dengan UMK yang ditetapkan.

3. Untuk lebih meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pemerintah kabupaten/kota dan swasta daerah perlu tindakan pro aktif, konduktif dan konstruktif untuk mendorong peningkatan investasi di daerah yang mengarah kepada padat

karya atau sektor riil, sehingga dapat mengurangi masalah pengangguran di masing-masing daerah.

4. Langkah kebijakan yang perlu juga dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur, dengan cara ; peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan kerja sehingga tercipta tenaga kerja yang berkualitas, perluasan kesempatan kerja di dalam negeri dan ke luar negeri, dan Pemetaan potensi tenaga kerja di seluruh kabupaten/kota propinsi Jawa Timur harus sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

---

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Amri. 2007. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Inflasi dan Pengangguran*. Vol. 1 No. 1, 2007, Jambi.
- Baier, Scott L dan Jeffrey H Bergstand. 2001. The Growth of World Trade; Tariffs, Transport Costs, and Income Similarity. *Journal of International Economics*. Vol. 53. hal 1-27.
- Blanchard, Oliver. 2006. *Macroeconomics*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River.
- BPS. 2011. *Data Makro Sosial Ekonomi Jawa Timur 2007-2011*. BPS Jatim: Buku 4, hal. 59-64.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur : Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur 2007-2011*. BPS Jatim.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2012* : BPS Jatim.
- DiNarno, John, dan Mark P. Moore. 1999. The Phillips Curves is Back? Using Panel Data to Analyze The Relationship Between Unemployment and Inflation in an Open Economy, NBER Working Paper No. 7328. hal 15-18. National Bureau of Economic Research.
- Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2011.
- Greenaway, David, Wyn Morgan dan Peter Wright. 2002. Trade Liberalization and Growth in Developing Countries, *Journal of Development Economics*. Vol 67. hal 229-244.
- Gujarati, Damodar. 2000. *Ekonometrika Dasar*. Trans. Sumarno Zain. Jakarta. Erlangga.
- Jhingan, ML. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Trans. D. Guritno. Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada. hal. 135.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Trans. D. Guritno. Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada. hal. 217-218.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pengantar Ekonomi*. Edisi Kedua. Jakarta : Erlangga.
- Mankiw, Gregory N. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Mudrajad, Kuncoro. 2004. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMPYKPN.
- Musriha, 2010. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/kota Yang kondusif di Jawa Timur, *Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi*. Vol 4. No. 2. ISSN 1978-5275. hal. 195.

- Roy, Sudipta Dutta. 2004. Employment Dynamics in Indian industry: Adjustment Lags and the Impact of Job Security Regulations, *Journal of Development Economics*. Vol 73. hal. 233-256.
- Salvatore, Dominick. 2007. *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sakernas dan BPS Jawa Timur, 2007-2011.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. Edisi Delapan Belas. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Simanjuntak, Payaman J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Siswosoemarto, Rubijanto. 2012. *Intelijen Ekonomi : Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirno, Sadono. 2008. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sucitrawati, Ni Putu dan Sudarsana Arka. 2012, *Pengaruh Inflasi, Investasi, dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran di Propinsi Bali*. Bali: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Trans. Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Trans. Haris Munandar. Jakarta: Erlangga. Edisi Sembilan Jilid 1. hal. 132-133.
- Trendle, Bernard. 2002. *Regional Variation in Queensland's Unemployment Rate*. LMRU Working Paper Series. Working Paper No. 7.
- UNCTAD. 2004. *Prospects for FDI flows, TNC Strategies and Promotion Policies: 2004-2007*.
- Walterskirchen, Ewald. 1999. *The Relationship Between Growth, Employment and Unemployment in the EU*. Austrian Institute of Economic Research.
- <http://www.bps.go.id>, diakses 8 Juli 2013.
- <http://www.disnakerjatim.go.id>, diakses 8 Juli 2013.